

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Pengaruh Pendudukan Jepang Terhadap Organisasi Militer di Indonesia". Tujuan dari penelitian ini adalah melihat dampak dari pendidikan militer Jepang terhadap TNI. Sebagaimana diketahui bahwa TNI lahir dari dua unsur pokok yakni para perwira didikan militer Jepang (eks-Peta dan laskar-laskar) dan para perwira didikan Belanda (eks-KNIL). Untuk mencapai tujuan tersebut maka tulisan ini mencoba untuk melihat latar belakang pendidikan militer Jepang dan pendidikan militer Belanda. Tulisan ini juga melihat dampak pendidikan militer Jepang pada masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) dan pada masa Demokrasi Liberal (1949-1959).

Penelitian ini merupakan penulisan sejarah deskriptif-analitis, sehingga dalam penulisannya digunakan teori dan metodologi sejarah. Untuk itu digunakan pendekatan dengan ilmu-ilmu sosial, secara multidimensional. Secara lebih khusus, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan politik dan sosiologi. Penelitian ini merupakan hasil dari studi pustaka. Data-data yang dipergunakan berasal dari sumber-sumber tertulis yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku, majalah dan bahan-bahan tulisan lainnya.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dampak dari pendidikan militer Jepang terhadap organisasi militer di Indonesia pada masa Revolusi Kemerdekaan masih terlihat. Pada masa itu para perwira yang mendapat pendidikan militer Jepang seperti tentara eks-Peta dan laskar-laskar dilebur menjadi satu oleh pemerintah dalam satu wadah yakni TKR yang kemudian dirubah menjadi TNI. Namun, tidak hanya para perwira didikan Jepang saja dilebur ke dalam TNI. Terdapat pula para perwira didikan Belanda yakni tentara eks-KNIL. Pada tahun 1948, dikeluarkannya program "Reorganisasi-Rasionalisasi" oleh Kabinet Hatta mendorong pengurangan jumlah tentara secara besar-besaran. Program tersebut dilakukan dengan cara mengeluarkan para perwira didikan militer Jepang yang dianggap tidak profesional. Usaha tersebut menimbulkan kekecewaan dari berbagai pihak, terutama para perwira didikan militer Jepang, sehingga timbullah peristiwa pemogokan buruh di Delanggu serta Peristiwa Madiun 1948.

Pada masa Demokrasi Liberal, dampak dari pendidikan militer Jepang dalam TNI makin berkurang. Konflik intern TNI antara para perwira didikan militer Jepang (eks-Peta dan laskar-laskar) dengan para perwira didikan militer Belanda (eks-KNIL) semakin melebar. Hal tersebut terjadi karena KSAD Nasution tetap melanjutkan Program Rasionalisasi dan Profesionalisme dalam tentara. Konflik intern TNI terutama Angkatan Darat kemudian dibahas dalam parlemen. Akibatnya terjadi banyak peristiwa dan pergolakan daerah, seperti peristiwa 17 Oktober 1952 dan pergolakan daerah PRRI/Permesta. Seusai pemberontakan para perwira yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa tersebut kemudian dikeluarkan dari TNI. Akibatnya dalam perjalanan waktu pengaruh pendudukan Jepang terhadap organisasi militer di Indonesia berangsur-angsur mulai menghilang akibat dari program rasionalisasi tentara.

ABSTRACT

The title of this study is "The Influence of Japanese Occupation on Military Organizations in Indonesia". The objective of this research is to find the effects of Japanese military training on the TNI (Indonesian National Army). TNI was formed from two major elements, namely Japanese educated military officers (eks-Peta and paramilitary troops) and Dutch educated military officers (eks-KNIL). To achieve its objective, the research tries first to look the background of Japanese military education and Dutch military education. This research also tries to find the effects of the Japanese military education during the period of the Revolution of Independence (1945-1949) and the period of Liberal Democracy (1949-1959).

This study is descriptive-analytical in nature, using political and sociological approach. This work is based on library research, using books, newspapers, magazines and other material relevant to the study.

The result of the research show that the effects of Japanese military education towards military organizations in Indonesia during the period of Revolution of Independence was strong. During the Revolution, the Japanese military educated officers such as the army of eks-Peta and paramilitary troops were united into TNI by the government. However, it was not only the Japanese educated officers that were joined into TNI. The Dutch military educated officer such as eks-KNIL soldiers were also included. In 1948, the Hatta Cabinet issued so-called the "Rationalization-Reorganization Program" that caused a great reduction of the number of soldiers. The program was done by excluding the Japanese educated military personal that were considered as non-professional. This program disappointed many groups especially the Japanese educated military personal. In turn, the disappointment lead to the labor strike in Delanggu and the 1948 Madiun Affair.

During the Liberal Democracy period, the effects of Japanese military education was decreasing. Internal conflicts between the eks-Peta and eks-KNIL became more serious. This happened because KSAD Nasution continued the Rationalization and Professionalism Program the national army. TNI is internal conflict especially the ARMY was discussed in the parlement, which then lead to some incidents. The incidents are incident of 17 October 1952 and other regional rebellions such as PRRI/Permesta. As a result, the role of the Japanese educated military officers declined.